

# BELAJAR DARI KEPELOPORAN PEMUDA 1928

Rufinus LAHUR

"Hanya bangsa yang dapat memetik pelajaran dari masa yang silam dan cakap mempergunakan pengalaman-pengalamannya dalam menghadapi masa depan, dapatlah bangsa itu menjadi bangsa yang besar." (SOEKARNO)

"Terpecahbelahnya generasi muda tidak saja merugikan generasi muda sendiri melainkan juga merugikan bangsa dan memudarkan harapan masa depan kita." (SOEHARTO)

## PENGANTAR

Pada awal kelahiran Orde Baru tahun 1966, Mohammad Hatta mengajukan suatu pertanyaan apa sebab pemuda mahasiswa sewaktu-waktu melakukan peranan yang begitu penting dalam perkembangan politik dan haluan negara? Apa sebab pemuda sering-sering mendahului orang-orang tua yang sudah matang dalam politik? Kemudian beliau sendiri mengemukakan bahwa pertanyaan itu tidak sukar menjawabnya. Pertama, pemuda masih murni jiwanya dan ingin melihat pelaksanaan secara jujur apa-apa yang telah dijanjikan kepada rakyat. Pandangan politiknya terbatas kepada cara melaksanakan tujuan itu, yang dasar-dasarnya sudah tertanam dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, mahasiswa pada universitas dididik berpikir secara ilmiah. Dan ilmu tujuannya mencari kebenaran. Membela kebenaran menjadi tugas utama bagi orang yang menuntut ilmu. Pikiran yang diasah semacam itu bersikap kritis terhadap realitas dan perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran. Apabila negara kita menurut Undang-Undang Dasar 1945 berdasar kepada demokrasi, pikirannya yang kritis menolak tindakan pemerintah yang bertentangan dengan demokrasi.<sup>1</sup>

Pertanyaan di atas ini rupanya juga dirangsang oleh adanya peranan pemuda dan mahasiswa tahun-tahun 1966. Dalam memperingati 50 tahun

---

1 Mohammad Hatta, *Peranan Pemuda Menuju Indonesia Merdeka Indonesia Adil dan Makmur*, Penerbit "Angkasa" Bandung, 1966, halaman 12; pemikiran dari Mohammad Hatta ini banyak persamaannya dengan apa yang pernah diajukannya 50 tahun yang lalu dalam pidato pembelaan di depan Pengadilan Den Haag tanggal 9 Maret 1928, yaitu antara lain apa sebabnya pemuda-pemuda, mahasiswa Indonesia, secara aktif ikut berpolitik; pidato ini kemudian diterbitkan dengan judul *Indonesia Merdeka*.

peranan pemuda tahun 1928 pertanyaan yang serupa juga secara tersirat dan tersurat diajukan oleh pelbagai pihak kepada pemuda tahun 1928 itu. Salah satu daripadanya dan yang mirip dengan pertanyaan Mohammad Hatta di atas ialah dari Harian Umum *Sinar Harapan* pada tanggal 16 Oktober 1978, yang menurunkan tajuk dengan judul "Rahasia Peranan Kepeloporan". Dikatakan bahwa "Peranan historis angkatan muda pada waktu itu ialah bahwa mereka lebih dahulu dan lebih jelas memahami tantangan .... Selanjutnya bahwa mereka memberikan jawab yang tegas terhadap tantangan itu, juga lebih dahulu daripada bangsa sebagai keseluruhan". Jadi "Semangat dan jiwa yang memahami dan menjawab secara tegas tantangan-tantangan yang dihadapi oleh bangsa dengan melihat jauh ke depan" inilah yang dikatakan sebagai letak "rahasia peranan kepeloporan" tersebut.

Dari dua cukilan tersebut di atas mungkin sudah kelihatan apa yang menjadi inti kepeloporan pemuda pada umumnya dan pemuda tahun 1928 pada khususnya. Juga dengan demikian lebih jelas apa yang bakal diambil sebagai pelajaran.

Dalam melihat peranan kepeloporan seperti halnya kepeloporan pemuda tahun 1928 dapat dikemukakan dua faktor utama yang universal. Yaitu pada satu pihak terdapat "masalah masyarakat", sedangkan pada pihak yang lain "masyarakat" sebagai subyek termasuk unsur pemudanya. Sejauh mana unsur pemuda menyadari masalah yang dihadapinya tergantung pada banyak faktor, tetapi yang pasti kadar jawaban yang bakal diberikan sangat tergantung pada kadar pengertian terhadap masalahnya. Ketepatan "tanya-jawab" inilah yang menentukan perkembangan masalah selanjutnya.

Bobot peranan pemuda umumnya juga dipengaruhi oleh dua kondisi; pertama, kondisi makro yang memberikan ruang gerak maksimal untuk berfungsi, dan kedua, kondisi mikro yaitu kondisi para pemuda itu sebagai keseluruhan. Pada jaman penjajahan kedua kondisi itu dialami sebagai berpengaruh negatif. Namun para pemudanya dapat menerobos kekangan ini dengan semangat berdikari, tanpa harus menyerah kalah terhadap suratan nasib yang pada waktu itu sangat ditentukan oleh suasana makro dari sistem penjajahan.

Sesudah 35 tahun merdeka masalah masyarakat telah berubah, begitu juga masyarakat termasuk unsur pemudanya. Dialog antara masalah masyarakat dan pemuda juga dipengaruhi oleh kedua kondisi tersebut di atas, yaitu kondisi mikro (pemuda) dan kondisi makro. Apakah pemuda dapat menghilangkan pengaruh negatif dari kedua kondisi itu dan mengembangkan segiseginya yang positif akan turut menentukan kondisi peranannya sekarang dan pada masa yang akan datang.

Dengan semangat seperti yang diuraikan di muka maka penulis ingin meninjau apa yang menjadi judul di atas, yaitu Belajar dari Kepeloporan

Pemuda 1928. Dengan Pemuda 1928 dimaksudkan ketekadan semangat pemuda waktu itu seperti yang tercermin dalam hasil kerapatan pemuda yang kemudian lebih dikenal sebagai Sumpah Pemuda.<sup>1</sup> Dalam tulisan ini, berturut-turut akan ditinjau mengapa Sumpah Pemuda itu menarik perhatian, apa yang dapat ditarik untuk dijadikan pelajaran, bagaimana kondisi persatuan dalam mengisi kemerdekaan sekarang ini, berikut semacam himbauan untuk mencari komonis sistem pembangunan masyarakat Pancasila, kemudian ditambah dengan uraian terakhir sebagai penutup.

## MENGAPA SUMPAH PEMUDA MENARIK PERHATIAN

Selama ini telah dilaksanakan sembilan kali Kongres Pemuda Indonesia, enam diantaranya dilaksanakan sesudah kita merdeka. Yaitu antara lain kongres yang ketujuh berlangsung di Surabaya pada bulan Juni 1950, yang kedelapan di Bandung pada tahun 1960 dan 18 tahun kemudian yaitu pada tahun 1978 diadakan kongres lagi kalau dilihat sebagai kelanjutan dari kongres yang sebelumnya merupakan kongres yang kesembilan.<sup>2</sup> Atau kongres yang keenam sesudah kita merdeka. Akan tetapi penamaan kongres yang sekarang ini agak lain, yaitu "Kongres Pemuda/KNPI-II".

Apa arti penamaan ini terhadap kontinuitas sejarah kongres pemuda Indonesia keseluruhannya tidak begitu jelas dan tidak menjadi sasaran dari tulisan ini. Tetapi yang tidak dapat diragukan lagi ialah bahwa dari semua kongres pemuda yang pernah diadakan itu hanya satu yang sangat menarik perhatian seluruh bangsa yaitu kongres yang kedua pada bulan Oktober 1928 di Jakarta. Sedangkan kongres-kongres lainnya tidak begitu menarik perhatian seluruh bangsa bahkan kurang diperhatikan oleh pemuda sendiri apa sebenarnya yang telah menjadi keputusan kongres-kongres yang bersangkutan; kesan mana sangat merugikan image (gambaran diri) organisasi pemuda dalam masyarakat. Dalam hubungan ini tepat sekali konstataasi Presiden Soeharto bahwa "Bangsa kita akan mengalami kemunduran dan kehilangan

1 Mengenai peristiwa Kongres Pemuda Indonesia ke-2 ini dapat dibaca secara sepintas lalu dalam berbagai buku sejarah pergerakan bangsa Indonesia, antara lain Pringgodigdo A.K., *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Pustaka Rakyat N.V., Jakarta, 1950; Sartono Kartodirdjo, *Sejarah Nasional Indonesia V*; Margono, *Ikhtisar Sejarah Pergerakan Nasional 1908-1945*; begitu juga buku *Sejarah Perjuangan Pemuda Indonesia* yang diterbitkan oleh Biro Pemuda Departemen P dan K, 1963; dan *Risalah Gerakan Pemuda* yang disusun oleh Sardjito; uraian yang agak banyak juga dapat dibaca dalam buku "*45 Tahun Sumpah Pemuda*" dan dalam buku *Bunga Rampai Sumpah Pemuda 50 Tahun*; akan tetapi uraian yang dapat dianggap agak menyeluruh dapat dilihat pada skripsi Suwarno yang berjudul *Kongres Pemuda Indonesia ke-2 menghasilkan "Sumpah Pemuda"*, 1972 (39 hal.)

2 Lihat *Ensiklopedi Umum*, Penerbit Yayasan Kanisius, 1973, hal. 690-694

elan dinamis apabila generasi muda hanya menjadi "pengekor" dan bukan "pelopor".<sup>1</sup>

"Kerapatan pemuda-pemuda Indonesia" tahun 1928 ini mengambil putusan yang kemudian lebih dikenal sebagai SUMPAAH PEMUDA, sedangkan tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda oleh seluruh bangsa, seperti halnya pada tahun 1978 dengan melakukan macam-macam kegiatan seperti Kongres Bahasa Indonesia yang ke-3, Munas Pramuka, dan lain-lain kegiatan yang bertema kepemudaan seperti lokakarya, dialog, seminar, Kongres Pemuda/KNPI-II, berikut pelbagai ulasan dan kenangan melalui pelbagai mass media. Pendeknya tampak sekali bahwa hasil kongres pemuda Indonesia yang ke-2 itu semakin menarik perhatian seluruh masyarakat.<sup>2</sup> Sejarahwan Arnold Toynbee dalam bukunya *A Study of History* (halaman 900) mengemukakan bahwa ..... "the curiosity can be stimulated only when the process of social change is vividly and violently apparent".

Adanya perubahan sosial yang mendasar, misalnya di daratan Tiongkok pada abad ke-20 ini di bawah kepemimpinan Ketua Mao, mendorong keinginan tahu dari banyak pihak, tidak saja dari kawan-kawannya akan tetapi juga dari lawannya.

Untuk meminjam istilah sejarahwan di atas, "perubahan sosial" apakah sebenarnya yang diciptakan oleh Sumpah Pemuda, sehingga mengundang keingintahuan orang kepadanya? Penulis melihat paling tidak secara positif ada dua hal. Pertama, melihat *isi* dari putusan kerapatan pemuda waktu itu yang menunjukkan adanya *mutasi nilai* dari masyarakat Indonesia seluruhnya, yaitu dari berorientasi pada *tanah air sempit* yaitu Sumatera, Jawa, Selebes, Ambon, dan sebagainya, *berubah menjadi* lebih luas yaitu *tanah air Indonesia*;<sup>3</sup> begitupun dari *kebangsaan sempit* seperti Jawa, Selebes, Ambon, Sumatera, dan sebagainya menjadi *kebangsaan yang lebih luas* yaitu *satu bangsa Indonesia*. Sedangkan di bidang kebahasaan, menjunjung tinggi

- 
- 1 Sambutan Presiden pada Upacara Pembukaan Lokakarya Nasional Pembinaan Generasi Muda pada tanggal 4 Oktober 1978 di Jakarta, Sekretariat Negara Republik Indonesia, hal. 3
  - 2 Lihat antara lain dalam Majalah *Tempo*, "Pemuda Dalam Tiga Kotak?" Nomor 33 Tahun VIII, 14 Oktober 1978; Majalah *Topik*, "KNPI dalam Ujian", Nomor 20-21, Oktober 1978; Majalah populer, *Dialog*, "Generasi Muda Kita Bersumpah Untuk Bersatu", Nomor 11, 20 Oktober - 4 Nopember 1978; Majalah *Pustaka*, "Indonesia yang kita Inginkan", Nomor 7 Tahun II; Majalah *Matahari*, Nomor 10, Tahun I, 16-31 Oktober 1978
  - 3 Ajip Rosidi mengungkapkan adanya "perubahan kaki langit kesadaran", seperti yang dilihatnya pada diri Moh. Yamin yang dalam memperingati Jong Sumatera Bond tahun 1921 menerbitkan sebuah buku kumpulan sajak yang berjudul *Tanah Air* yang dimaksud Andalas (Sumatera); kemudian pada tahun 1928 Moh. Yamin menerbitkan sebuah buku kumpulan sajak baru yang berjudul *Indonesia Tumpah Darahku* (Ajip Rosidi, Sumpah Pemuda yang Berubah, dalam buku *Bunga Rampai Sumpah Pemuda* tersebut di atas)

*bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia.* Kedua, secara *nasional* disaksikan dan dialami sentuhan pengaruh (impact) dari putusan itu yang sangat mengarahkan dan menentukan perjuangan selanjutnya, termasuk proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 yang dicetuskan oleh Soekarno-Hatta *atas nama bangsa Indonesia<sup>1</sup> yang satu itu.* Jadi dewi sejarah telah membuktikan kebenaran dan ketepatan putusan kerapatan pemuda Indonesia ini yang bahkan diberlakukan selanjutnya sebagai *sumpah* dari *pemuda Indonesia*, yang dilaksanakan secara konsisten. Pendeknya sangat dirasakan kesatuan antara *kata* (Sumpah) dan *perbuatan*. Hal yang terakhir inilah yang sangat didambakan oleh para pemuda selanjutnya yang sangat gandrung kepada *kejujuran* dari *siapa saja* yang berbicara tentang hal yang *muluk-muluk*. Mereka ini menuntut bukti, dan inilah yang mereka tidak ketemukan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi sejak kita merdeka demikian banyak dengungan sumpah dalam masyarakat, baik dari ruang pengadilan maupun di luarnya, seperti sumpah pegawai negeri, sumpah prajurit, sumpah anggota DPR, sumpah anggota MPR, dan lain-lain sumpah jabatan dan sumpah profesi.<sup>2</sup> Isi dari sumpah umumnya menjanjikan yang muluk-muluk dan luhur, seperti janji untuk melakukan tugas kewajiban sebaik-baiknya, mendahulukan kepentingan umum (bangsa) dan sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan lain-lain peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi nyatanya pengaruh dari sumpah itu tidak terasa, tidak tampak dalam perbuatan sehari-hari. Bukan saja masyarakat umum yang tidak lagi seberapa menghiraukan isi dari sumpah-sumpah itu akan tetapi juga "ahli hukum maupun pihak ahli-ahli agama",<sup>3</sup> dan bahkan mungkin juga pejabat yang bersumpah tidak mengetahu dan menyadari arti dan konsekuensinya.

Jadi orang memandang sumpah sebagai suatu upacara administrasi yang hampa, sekedar memenuhi persyaratan formal administrasi belaka. Sehingga bagi masyarakat umum, ada atau tidak ada sumpah sama saja. Mungkin kurang bermaknanya aneka sumpah yang ada selama ini turut mengakibatkan semakin menonjolnya SUMPAAH PEMUDA tahun 1928 itu. Peringatan sumpah pemuda akhir-akhir ini dapat juga dianggap sebagai cermin kerinduan masyarakat sekarang ini kepada kejujuran semangat sumpah yaitu satunya kata dengan perbuatan. Dan mudah-mudahan dengan macam-macam peringatan sumpah pemuda sekarang ini, sumpah tahun 1928 itu dapat memberi semangat baru terhadap sumpah-sumpah lainnya sehingga lebih bermakna bagi masyarakat dan karenanya membawa perubahan yang memajukan masyarakat seluruhnya, sekaligus memulihkan dan mengembalikan makna yang

---

1 *Berita Republik Indonesia*, Tahun II No. 7, hal. 45, kolom 1

2 Bandingkan misalnya isi sumpah seperti yang tertuang dalam pasal 9 UUD 1945 serta 'Sumpah Prajurit', dalam buku *Dharma Pusaka 45*, Departemen Pertahanan Keamanan, 1972, hal. 16

3 Lihat St. Moh. Syah, "Kesimpangsiuran pada Penyumpahahan", *Majalah Badan Pembinaan Hukum Nasional*, Departemen Kehakiman, No. 1, 1978, hal. 6

terkandung dalam istilah sumpah yang tidak saja politis dan yuridis akan tetapi juga terutama ethis.

## PELAJARAN APA YANG DAPAT DITARIK DARI SUMPAH PEMUDA?

Kongres ke-2 sebagai peristiwa sejarah yang telah terjadi 52 tahun lalu itu tidak mungkin berulang kembali sebagai halnya "siaran ulangan" di TVRI. Bukan saja karena alamnya lain, yaitu dahulu alam penjajahan dan sekarang alam kemerdekaan, begitupun dimensi masalah berbeda serta pelaku-pelakunya berbeda juga termasuk latar belakang dan tingkat kedewasaan mereka, akan tetapi memang telah menjadi hukum masyarakat bahwa tidak mungkin ada dua peristiwa yang tepat sama. Walaupun begitu ungkapan di atas ini juga tidak berarti bahwa masa sekarang sama sekali tidak ada hubungan dengan masa lampau, yaitu satu sama lain terlepas dan terpisah. Akan tetapi sejarah masyarakat merupakan suatu kebulatan yang berlanjut yang satu sama lain saling berhubungan.<sup>1</sup> Malah masalah masa kini berakar pada masa silam dan karena itu seharusnya orang pada masa kini mempelajari masa lampau, mencari inspirasi untuk dapat lebih baik mempelajari duduk masalah yang dihadapi hari ini dan masa yang akan datang sehingga dapat mengetahuinya lebih tepat untuk selanjutnya ditanggapi secara tepat pula.<sup>2</sup> Semangat yang baru disebut inilah antara lain yang dapat dilihat juga dari suasana peringatan 50 tahun sumpah pemuda itu, baik melalui saksi-saksi yang masih hidup maupun para pengamat sejarah yang dengan caranya masing-masing menurunkan uraian baik mengenai peristiwanya, aneka kenangan, tafsiran serta harapan yang ditujukan kepada pemuda Indonesia pada umumnya.

Setiap peristiwa mengandung nilai yang tersurat dan terlebih-lebih yang tersirat; sejauh mana nilai itu dapat dilihat dan dimengerti serta dijadikan pedoman oleh suatu masyarakat sangat tergantung pada tingkat kedewasaan manusia dalam masyarakat yang bersangkutan; jadi setiap peristiwa apapun setiap kali akan mendapat makna baru dalam sejarah dan dalam lingkungan hidup manusia selanjutnya.<sup>3</sup> Ada banyak hal dari sumpah pemuda itu yang

---

1 H. Roeslan Abdulgani, "Api Ilmu Sejarah dan Obor Revolusi", *Di hadapan Tunas-tunas Bangsa*, BP. Prapanca, Jakarta, t.th., hal. 286

2 Lihat R. Moh. Ali, *Sejarah dalam Revolusi dan Revolusi dalam Sejarah*, Bhratara, Jakarta, 1965; lihat juga antara lain pidato Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1964 yang berjudul *Tahun Vivere Pericoloso* (Tavip); juga *Indonesia Ayam Jantan Sejarah Dunia Baru!*, Universitas Pajajaran, Prapanca, Jakarta, 1964

3 Sutjipto Wirjosuparto, *Duapuluh Tahun Ilmu Sejarah di Indonesia 1945-1965*, IV, Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya Departemen Urusan Riset Nasional Republik Indonesia, 1965 hal. 279-303

dapat ditarik untuk dijadikan pelajaran. Beberapa daripadanya penulis kemukakan di bawah ini. Pertama, bahwa masyarakat umumnya pada waktu itu mampu menangkap semangat jamannya, yaitu tekad untuk bersatu melawan penjajah. Kedua, atas dasar persepsi yang tepat mengenai realita masyarakat ini dikembangkan sikap dan tindakan yang tepat pula, sekaligus kesediaan untuk mensubordinasi kepentingan golongan demi kesatuan dan persatuan bangsa. Misalnya ketika membicarakan soal dasar pendidikan dalam kongres pemuda 1928 itu semua pembicara menekankan perlunya dasar rasa cinta kepada tanah air dan dasar kebangsaan. Karenanya ketika S.M. Kartosuwirjo mengajukan agar dasar pendidikan bagi anak Indonesia adalah agama Islam, pembicaraannya distop oleh pimpinan sidang (Sugondo) oleh karena dianggap "bertentangan dengan persatuan kebangsaan".<sup>1</sup> Begitu juga mengenai penerimaan bahasa persatuan bahasa Indonesia merupakan pencerminan dari semangat yang sama dari semua suku yang mempunyai bahasa daerahnya masing-masing terutama yang jumlah pemakainya jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan pemakai bahasa Melayu waktu itu. Ketiga, kedua hal tersebut di atas ini pemahamannya sangat dipertajam oleh tingkat intelektual dan kesadaran politik serta visi dari para pemimpin masyarakat pada umumnya termasuk yang berada di luar negeri, berikut adanya komunikasi yang relatif lancar baik antara yang tua dan muda maupun antara sesama organisasi pemuda itu sendiri. Komunikasi itu tidak saja didorong oleh adanya kesamaan nasib, akan tetapi hasil komunikasi itu juga turut memperkukuh solidaritas dan kesatuan serta persatuan antara mereka selanjutnya.

Dapat dikatakan bahwa tema yang menjadi putusan kerapatan pemuda tahun 1928 itu bukanlah suatu kegiatan yang terlepas dan terpisah dari proses sebelumnya. Malah sebaliknya, pemuda Indonesia melalui putusannya itu menonjol kepeloporannya sebagai juru bicara masyarakat bangsa<sup>2</sup> dan sekaligus membawa semangat baru pada perjuangan yang telah ada. Unsur kepeloporan itu merupakan peranan khasnya sebagai fungsi dari ketiga hal tersebut di atas.

- 
- 1 Lihat Suwarno, *op. cit.*, hal. 27; apa yang ditegaskan oleh Soegondo ini jika ditinjau dengan kaca mata tahun 1928-an adalah cermin daripada semangat jaman waktu itu; di mana seperti dikatakan juga oleh Ruben Naelan "organisasi pemuda, pelajar dan mahasiswa sampai dengan tahun 1930 memiliki cita-cita Kebangsaan Indonesia, meskipun di antaranya mengelompokkan diri dalam organisasi pemuda suku. Cita-cita Kebangsaan ternyata mengatasi faktor agama". (*Bunga Rampai Sumpah Pemuda*, hal. 527)
  - 2 Kesan sebagai "juru bicara" masyarakat bangsa ini secara jelas dapat diikuti kembali dalam pelbagai buku sejarah pergerakan bangsa Indonesia, antara lain seperti yang telah dikutip di atas. Sebagai tambahan ilustrasi lihat buku *Indonesia Merdeka* (pidato dari Bung Hatta tahun 1928); juga Sartono Kartodirdjo, *op. cit.*, hal. 199; malah dalam tulisannya "Sekitar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928" Mohammad Hatta dengan tegas mengemukakan "bahwa sumpah pemuda itu yang mengatakan bahwa mereka bertanah air satu, berbangsa satu dan berbahasa persatuan satu, adalah hasil daripada perjuangan politik yang dirintis oleh Perhimpunan Indonesia".

Andaikata ketiga hal tersebut memang ada benarnya sebagai unsur untuk melakukan peranan sebagai pelopor, mengapa justru pengalaman yang berharga itu sangat sukar dibina dalam alam kemerdekaan?

## KONDISI KESATUAN DAN PERSATUAN DALAM MENGISI KEMERDEKAAN

Sumpah Pemuda telah mengarahkan pergerakan bangsa Indonesia sampai direbutnya kemerdekaan bangsa tanggal 17 Agustus 1945. Atau dengan kata lain, dalam alam penjajahan kita telah berhasil untuk bersatu demi tercapainya kemerdekaan. Akan tetapi sesudah kita merdeka ternyata kesatuan dan persatuan antara pelbagai golongan masyarakat untuk mengisi kemerdekaan sangat sulit dicapai.

Kemerdekaan yang telah dicapai membuka lembaran baru bagi kehidupan masyarakat bangsa Indonesia, yaitu terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan ideologi negara Pancasila, UUD 1945,<sup>1</sup> berikut rangkaian kegiatan pembangunan serta pengalaman berkepemimpinan sendiri baik pada bidang pemerintahan maupun pada bidang kemasyarakatan pada umumnya. Andaikata hal-hal tersebut di atas kita anggap sebagai '*sumpah bangsa Indonesia*' untuk mengisi kemerdekaan maka tampak sekali dari semua pihak tidak ada kesatuan pengertian, sikap, tindakan dan kesungguhan untuk melaksanakannya. Begitu pun tidak ada hubungan antara ideologi dengan pembangunan berikut tidak tampak refleksinya dalam tingkah laku kepemimpinan. Masing-masing berjalan sendiri tanpa hubungan satu sama lain. Memang kita telah mempunyai bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, akan tetapi untuk mengisi kemerdekaan, kita tidak mempunyai kesatuan bahasa, sehingga praktis tidak ada komunikasi antara pelbagai pihak, baik vertikal maupun horisontal. Mungkin inilah warisan penjajahan yang paling mendasar bahwa akibat politik pecah belahnya, ternyata sangat mendalam pengaruhnya pada kehidupan masyarakat Indonesia.<sup>2</sup> Walaupun secara formal kita sudah merdeka, akan tetapi secara mental kita belum bebas dari kelemahan-kelemahan, baik yang diwariskan maupun kelemahan ciptaan kita yang baru sebagai akibat proses perkembangan pada pelbagai bidang selama 35 tahun merdeka. Kelemahan-kelemahan itu pada pelbagai bidang perdefinisi merupakan bentuk penjajahan baru yang mungkin kita tidak sadari.

1 Mengenai masalah penuangan nilai ideologi negara Pancasila dalam konstitusi (UUD) tidak akan diperinci di sini. Akan tetapi yang jelas, bahwa dalam bidang inipun tampak para pemimpin tidak mempunyai 'kesatuan bahasa'. Hal mana antara lain tampak dari demikian seringnya pergantian konstitusi selama ini, sedangkan pada pihak lain, tidak ada satupun daripadanya yang pernah dilaksanakan secara bersungguh-sungguh.

2 Richard Robison, "Toward a Class Analysis of the Indonesian Military Bureaucratic State", *Indonesia*, No. 25, April 1978, p. 19

Sekedar ilustrasi. Misalnya ideologi negara Pancasila. Dari sejarah selama kita merdeka khususnya pada bidang ideologi negara, tampak paling tidak tiga kelemahan utama. Pertama, tidak ada usaha untuk mendalami pengertian ideologi negara Pancasila; dan sebagai akibatnya seperti yang dikemukakan oleh Syafruddin Prawiranegara, "belum semua orang, belum semua pemimpin dari berbagai golongan yang membentuk bangsa kita, sudah mengerti Pancasila". Dan itulah menurut beliau merupakan "letaknya kelemahan Pancasila".<sup>1</sup> Kedua, tidak ada contoh yang memadai dari mereka yang menyatakan diri sebagai Pancasila-lais dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, hampir semua organisasi kemasyarakatan terutama organisasi politik hingga sekarang ini di samping mempunyai ideologi negara Pancasila yang sering dijuluki sebagai "ideologi formal", juga mempunyai ideologi golongan, sehingga praktis selalu ada "dualisme ideologi" dalam masyarakat. Sebagai puncak dari ketiga kelemahan tersebut maka baik secara legal maupun ilegal ideologi negara dikhianati oleh semua pihak. Tampak sekali peranan integratif dari ideologi Pancasila masih pada taraf formal konstitusional dan belum fungsional. Malah sebagai yang telah dibuktikan oleh sejarah penyelewengan terhadap ideologi Pancasila, sering pelbagai pihak memberlakukan Pancasila sekedar sebagai *topeng* untuk menutupi kepentingan golongan atau semacam *nama samaran bersama* dari semua orang dengan mentalitas yang sering tidak selaras dengan namanya dan bertentangan satu sama lain. Dalam kondisi semacam ini sulit dilihat peranan ideologi dalam memecahkan masalah sosial yang dialami oleh seluruh masyarakat. Di manakah letak pemuda dalam masalah ideologi semacam ini? Dari 141 juta penduduk Indonesia pada tahun 1978, kira-kira 70% yaitu 98 juta berumur di bawah 30 tahun; dan lebih dari 50% daripadanya berumur 10-29 tahun.<sup>2</sup> Sebagian besar dari mereka ini berdiam di desa, sebagian buta huruf, putus sekolah dan menganggur atau setengah menganggur. Ditinjau dari sudut ideologi, sebagian besar dari mereka termasuk lapisan masyarakat yang disebut oleh Robert A. Dahl sebagai lapisan "apolitik".<sup>3</sup> Dan hanya sebagian teramat kecil yang masuk dalam lapisan "politik". Yang terakhir ini dikatakan demikian karena menunjukkan gejala keterlibatan dalam politik seperti adanya interest, concern, serta berusaha mendapatkan informasi mengenai peristiwa politik dan aktif dalam kegiatan politik seperti ikut memberikan suara dalam pemilihan umum dan sebagainya. Mereka yang termasuk dalam lapisan politik ini sebagian besar mungkin terpengaruh oleh orientasi organisasi "induknya" mengenai ideologi Pancasila. Sedangkan mereka yang "independen" sukar dibayangkan orientasinya. Akan tetapi yang apolitik mungkin lebih tenggelam da-

---

1 Syafruddin Prawiranegara, *Sejarah sebagai Pedoman untuk Membangun Masa Depan*, Yayasan Idayu-Jakarta, 1975, hal. 7

2 BPS, *Indikator Ekonomi*, Mei 1978, hal. 164

3 Robert A. Dahl, *Modern Political Analysis*, Prentice-Hall, Inc., 1963, p. 55-71

lam kesibukan hidup dan kesulitan hidup sehari-hari yang tidak ada kesudahannya. Dalam hal apa dan sejauh mana ideologi negara ada relevansinya dengan masalah yang mereka alami, mungkin akan turut menentukan sikapnya kelak terhadap ideologi yang ada, baik positif maupun negatif dan karenanya pasti mempunyai implikasi politik ideologis tertentu. Mungkin dapat dikatakan bahwa di kalangan pemuda juga belum ada kesatuan pengertian dan sikap terhadap ideologi Pancasila, mereka umumnya lebih merupakan cermin pasif dari masyarakatnya, seperti adanya dualisme ideologis, indifferen dan apathis untuk tidak mengatakan terasingkan (alienated).

Kondisi ideologis semacam yang disebut di atas dalam sejarah republik ini tampak juga akibatnya terhadap pembangunan atau program pembangunan yang dilakukan selama ini. Apalagi kalau pembangunan itu seharusnya diartikan sebagai media fundamental untuk merealisasi nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila. Tampak pengaruh ideologi terhadap perkembangan keadaan dan pembangunan tidak jelas dan tidak tegas, dengan akibat bahwa perkembangan keadaan/pembangunan yang ada, mengandung dan karenanya mengundang pelbagai masalah. Misalnya, dalam "fase transisi" (1945-1950),<sup>1</sup> "Benteng program"<sup>2</sup> (1950-1955) yang bermaksud menunjang pengusaha nasional ternyata tidak mencapai sarannya, pembangunan lima tahun (1956-1960) turut mengundang adanya "ketegangan-ketegangan antara Pusat dan Daerah",<sup>3</sup> Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) (1960-1968) lebih merupakan alat bagi Soekarno untuk mendapatkan dukungan politik yang luas baik dari daerah-daerah, partai politik dan golongan fungsional termasuk ABRI; dukungan mana sangat diperlukan untuk terlaksananya kebijaksanaan-kebijaksanaan politik waktu itu yang berporoskan *Nasakom*, dengan puncaknya pada pemberontakan G-30-S/PKI tahun 1965.<sup>4</sup> Pembangunan berikutnya sesudah tahun 1966 antara lain Repelita I dan II walaupun banyak membawa perubahan, akan tetapi juga menimbulkan

---

1 Presiden Soekarno dalam *pidatonya tanggal 17 Agustus 1950* mengemukakan bahwa perubahan keadaan dalam periode 1945-1950 sebagai "perubahan keadaan yang maha dahsyat"; malah dikatakan "sedikit sekali bangsa di dunia ini yang mengalami sekian banyaknya perubahan-perubahan keadaan yang demikian maha dahsyatnya dalam waktu yang demikian pendeknya, seperti bangsa kita"; lihat juga Mohammad Hatta, *Pelaksanaan Negara Kesatuan RI Lima Tahun* (pidato 17 Agustus 1950); lihat juga: Susanto Tirtoprodjo, *Sejarah Revolusi Nasional Indonesia Tahapan Revolusi Bersenjata 1945-1950*, PT Pembangunan Jakarta, 1963; masalah yang berhubungan dengan pembangunan ekonomi dapat dilihat antara lain dalam karangan Soemitro Djojohadikusumo, *Persoalan Ekonomi di Indonesia*, Indira-Jakarta, 1953

2 Richard Robison, *op. cit.*, p. 19-20

3 *Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960*, Biro Perancang Negara, hal. 9

4 Kata Pengantar J.B. Soemarlin dalam buku tentang Perbankan di Indonesia yang dikarang oleh Heinz Arndt diterbitkan oleh Badan Penerbit Indonesia Raya, hal. 6-7

banyak masalah berikut akibat sampingan, yang mewarnai suasana akhir-akhir ini dan lain-lain kelemahan fundamental yang diakui sendiri oleh para penanggung jawab pembangunan antara lain adanya ketimpangan sosial yang menyolok antara golongan dan daerah.<sup>1</sup>

Masalahnya yang paling mendasar dalam hubungan ini ialah sejauh mana masyarakat Indonesia (termasuk pemudanya) yang sudah mapan (established) mau berkorban untuk membina solidaritas sosial nasional secara berencana melalui pola pembangunan yang memadai; dan sejauh mana kemauan politik mengarah ke sana.

Sesudah membicarakan sepintas tentang kondisi ideologi dan pembangunan maka ada baiknya melihat pelaksana pembangunan yaitu masyarakat Indonesia yang untuk mudahnya dapat dibagi atas unsur masyarakat yang menjadi pemimpin termasuk penguasa dan masyarakat umumnya yang dipimpin. Tampak sekali bahwa sejak berkesempatan untuk bernegara/berpemerintahan sendiri kita belum sempat mengembangkan budaya kepemimpinan yang selaras dengan Pancasila dan UUD 1945, yaitu antara lain "memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur",<sup>2</sup> yang berarti berorientasi kepada rakyat yang dipimpin demi melepaskan mereka dari belenggu kemelaratan.<sup>3</sup> Semakin menggejala bahwa mental feodal lama dan lain-lain ciri masyarakat yang menghambat masih belum hilang sedangkan pada pihak lain menjamurnya gejala feodal baru yang tidak saja menulari lembaga negara/pemerintahan akan tetapi juga lembaga kemasyarakatan pada umumnya.<sup>4</sup>

Kaum feodal (lama) demikian menurut Bung Hatta, "tahu kewajiban terhadap masyarakat", sedangkan feodal baru, dikatakannya "hanya melihat pada haknya dan bukan kepada *tanggung jawabnya* terhadap masyarakat".<sup>5</sup> Atau dengan kata lain kaum feodal baru lebih jahat dari kaum feodal lama. Dan dalam tahun 1966 Bung Hatta mengemukakan bahwa "kekuasaan yang tidak diimbangi oleh tanggung jawab mudah menjelma jadi sewenang-wenang".<sup>6</sup> Adanya gejala seperti korupsi, komersialisasi jabatan, mental ABS,

1 Lihat usaha "Delapan Jalur Pemerataan" seperti yang dikemukakan oleh Presiden RI dalam pidato tanggal 16 Agustus 1978 di depan DPR-RI

2 Penjelasan UUD 1945

3 Lihat: Rufinus Lahur, "Tinjauan Dalam Negeri Tahun 1977", *Analisa*, Tahun VI, No. 12, Desember 1977, hal. 65

4 Nugroho, *Indonesia Sekitar Tahun 2000*, Jakarta, 1972, hal. 184-195; lihat juga sambutan Wakil Presiden Adam Malik yang mengemukakan agar anggota KORPRI 'jangan membiasakan diri bersikap feodal' (*Kompas*, 4 Desember 1978)

5 *Bung Hatta Menjawab*, Penerbit PT Gunung Agung Jakarta, 1978, hal. 184-185

6 Mohammad Hatta, *Mengambil Pelajaran dari Masa Lampau untuk Membangun Masa Datang*, Penerbit Angkasa Bandung, 1966, hal. 21

sikap tertutup, penyalahgunaan kekuasaan, pola hidup mewah, kurang berorientasi ke bawah pada hakikatnya menjauhkan pemimpin dari masyarakat yang dipimpinnya.<sup>1</sup> Akibatnya belum terwujudnya integrasi antara pemimpin dan masyarakat yang dipimpin. Karena kurang adanya hubungan maka kurang terbina saling pengertian dengan segala akibatnya antara lain saling curiga, buruk sangka dan semacamnya.

Rupanya suasana yang semacam ini tampak juga antara pemerintah dan dunia pemuda, hal mana tidak saja merugikan para pihak akan tetapi juga akhirnya merugikan seluruh masyarakat.<sup>2</sup>

Dari kondisi ketiga hal tersebut di atas yaitu ideologi, pembangunan dan pola budaya kepemimpinan tampak sekali bahwa dalam alam kemerdekaan ini masyarakat kita sulit sekali untuk bersatu mengisi kemerdekaan. Gejala ini sekaligus merupakan pertanda telah tumbuhnya suatu tuntutan kebutuhan akan sistem pembangunan yang bersumber Pancasila dengan mengembangkan solidaritas nasional demi semakin terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Kondisi sulitnya bersatu ini terefleksi juga pada pemudanya. Masalahnya apakah pemuda kita mau menjadi sekedar cermin pasif masalah masyarakat, dengan mental pegawai atau mau merupakan "nucleus" pengubah keadaan?

## MENCARI KOMPONIS SISTEM PEMBANGUNAN MASYARAKAT PANCASILA

Sistem pembangunan masyarakat Pancasila pada pelbagai bidang seperti yang dimaksudkan oleh judul ini untuk mudahnya penulis analogikan saja dengan suatu nyanyian. Nyanyian yang sesuai dengan kebutuhan, kena di hati jelas lagu dan syairnya. Dengan demikian kita mengharapkan agar seluruh WNI tanpa kecuali dapat ikut dalam menyanyikan lagu ini, baik karena belajar sendiri maupun belajar dari orang lain. Sehingga berdasarkan pengetahuan itu siapa saja dapat menyanyikannya dalam suatu koor raksasa, koor nasional tanpa ada yang menganggur.

Contoh lebih konkrit. Satu lagu yang merupakan bagian dari putusan kongres tahun 1928 ialah lagu Indonesia Raya. Yang menarik bagi penulis ialah bahwa sang komponis Wage Rudolf Supratman, berkat pemahamannya yang dewasa terhadap semangat jamannya ia tergugah untuk mengungkap-

---

1 Lihat juga tema dan hasil Musyawarah Besar MKGR ke-1, tanggal 20-23 September 1978 di Semarang (*Antara*, 22 September 1978/A)

2 Lihat juga Sarlito Wirawan Sarwono, *Perbedaan antara Pemimpin dan Aktivistis dalam Gerakan Protes Mahasiswa, suatu Studi Psiko Sosial* (Disertasi, 1978)

kannya dalam alunan lagu indah bersemangat berikut untaian syair yang selaras sebagai pencerminan semangat nasionalis dan patriotik yang gemilang yang sanggup membangkitkan semangat juang bangsa pada waktu itu dan seterusnya. Karena demikian kena di hati rakyat sehingga dalam waktu yang singkat tanpa penataran khusus, sebentar saja lagu itu dinyanyikan oleh seluruh rakyat dan menggema di seluruh tanah air, menjadi bagian dari hidup mereka. Di situlah kebesaran sang komponis, menciptakan sesuatu yang kemudian sekaligus menjadi milik bangsa Indonesia, dan terus hidup menjadi milik masyarakat walaupun sang komponis telah tiada.

Lagu Indonesia Raya awal kelahirannya merupakan suatu kebutuhan. Menurut *Ensiklopedi Umum* sang komponis mendapat gugahan dari Majalah *Timbul* yaitu Majalah Studie Club Sala yang pernah mengungkapkan jeritan jamannya dengan bertanya: "Manakah komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia yang dapat membangun semangat rakyat?" Tergugah oleh pertanyaan ini demikian menurut *Ensiklopedi* itu maka "terciptalah syair dan lagu oleh Supratman". Kita tidak perlu sependapat dengan ungkapan *Ensiklopedi* ini. Sebab karya apapun saja belum tentu hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja.<sup>1</sup> Akan tetapi intinya ialah bahwa kehausan jaman yang juga diwakili oleh Majalah *Timbul* telah dijawab oleh sang komponis dengan tepat, sesuai dengan tuntutan kebutuhan, sehingga semua masyarakat dapat ikut ambil bagian dalamnya sekaligus mengobarkan semangat juang bangsa. Lagu yang berbobot semacam itulah yang penulis analogikan dengan sistem pembangunan masyarakat Pancasila. Di mana semua warga negara Indonesia tanpa kecuali sesuai dengan kemampuannya masing-masing dapat mengambil bagian di dalamnya tanpa sekedar menjadi penonton yang menganggur di luar pagar pembangunan yang ada.

Selama ini memang telah pernah dilontarkan "lagu pembangunan" seperti yang telah disampaikan di atas, yaitu mulai tahun 1950-1955; 1956-1960; 1960-1968; kemudian disusul dengan Repelita I, II dan III. Akan tetapi lagu-lagu ini belum merupakan lagu sistem pembangunan masyarakat Pancasila yang kita maksud. Karena lagu-lagu ini belum memberikan jaminan kesempatan dan kepastian bagi setiap warga negara untuk ikut mengambil bagian dalamnya, walaupun mereka sangat gandrung untuk mengetahui dan untuk ambil bagian. Hal itu antara lain tampak dari begitu banyaknya yang masih menganggur dan setengah menganggur sekedar menonton segelintir orang yang sedang menyanyi dengan versinya sendiri-sendiri.

Keresahan masyarakat yang telah disaksikan oleh dewi sejarah sejak kita merdeka pada dasarnya merupakan kelanjutan pertanyaan Majalah *Timbul*

---

1 Bandingkan dengan pendapat yang berlainan sama sekali dari Biro Pemuda Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op. cit.*, hal. 57

Sala dalam dimensi yang lain yaitu: Manakah komponis sistem pembangunan masyarakat Pancasila yang bisa menciptakan solidaritas nasional demi membangun semangat rakyat untuk membebaskan diri dari belenggu kemelaratan?

Inti daripada pertanyaan ini adalah jeritan akan perlunya suatu sistem yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang memungkinkan semua insan Indonesia dapat mengembangkan dirinya menjadi manusia dewasa, dalam arti yang seluas-luasnya. Masalahnya ialah sejauh manakah suasana yang ada sekarang ini mendorong dikembangkannya komponis-komponis tersebut yaitu pemikir-pemikir kemasyarakatan Indonesia pada pelbagai bidang yang merupakan cikal bakalnya tim komponis dari sistem pembangunan dimaksud. Kalau melihat kondisi kita selama ini maka apa yang dicita-citakan di atas masih merupakan impian. Kaum intelektual yang ada umumnya lebih merupakan barisan pemegang ijazah yang siap menjual jasanya pada pasaran kerja terutama untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, sedangkan pemuda dan mahasiswa dalam kerangka masalah ini sangat terombang-ambing letaknya.<sup>1</sup> Maklumlah kepeloporan jenis apapun mustahil dapat dilakukan tanpa adanya kejelasan dan ketegasan peranan yang bakal dilakukan. Dengan demikian potensi kepeloporan yang ada pada mereka tetap potensial alias nganggur (idle). Inilah salah satu bentuk pemborosan negara sedang berkembang di mana ketidakmampuan mengembangkan suatu sistem yang fungsional mengakibatkan komponen sumber daya berubah menjadi beban yang tidak perlu, tidak saja beban ekonomis akan tetapi sosial politik.

Untuk menutup seksi ini, tidak dapat dihindari kesan bahwa rupanya para pemimpin Indonesia baru sanggup mengagumi simbol-simbol dan ternyata belum mampu mengoperasionalisikannya; tentu ada macam-macam sebabnya, yang biasanya bertumpu di atas kepentingan mereka masing-masing. Rupanya manusia kaliber Supratman masih terlalu sulit dilahirkan dalam alam kemerdekaan ini. Mungkin benar apa yang pernah diungkapkan oleh Schiller bahwa "Suatu masa besar dilahirkan abad. Tetapi masa besar itu menemui manusia kecil".<sup>2</sup> Ini seharusnya dapat dianggap sebagai "ejekan" dewi sejarah sekaligus tantangan kepada kita semua terutama para pemudanya.

1 Bandingkan dengan peranan yang seharusnya dilakukan oleh kaum terpelajar seperti yang diungkapkan Sutan Sjahrir dalam *Simposium tentang Kesulitan-kesulitan Jaman Peralihan Sekarang*, tahun 1952; berikut fungsi dan peranan para mahasiswa, dalam *Konperensi Sosialis Asia*, di Bombay tahun 1956 (H. Rosihan Anwar, *Perjalanan Terakhir Pahlawan Sutan Sjahrir*, PT Pembangunan Jakarta, 1966, hal. 74); lihat juga Moh. Hatta, *Tanggung Jawab Moril Kaum Inteligensia*, Pidato yang diucapkan pada hari Alumni ke-1 Universitas Indonesia tanggal 11 Juni 1957, kemudian diterbitkan oleh Penerbit "Angkasa" Bandung, 1966

2 Moh. Hatta, *Demokrasi Kita*, Pustaka Antara PT Jakarta, 1976, hal. 33

## PENUTUP

Pemuda tahun 1928 sebagai juru bicara masyarakat telah menunjukkan adanya kesatuan bahasa untuk melawan penjajah sampai diproklamirkannya kemerdekaan bangsa Indonesia. Sehingga lahirlah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Seperti telah diuraikan di atas, ternyata sesudah kita merdeka pemimpin-pemimpin masyarakat Indonesia belum mempunyai kesatuan bahasa dalam mengisi kemerdekaan itu, baik pada bidang ideologi, pembangunan, budaya kepemimpinan serta secara menyeluruh belum dibentuknya apa yang disebut sebagai sistem pembangunan masyarakat Pancasila pada pelbagai bidang dan karenanya sampai sekarang ini kita belum memiliki strategi pembangunan.<sup>1</sup> Salah satu akibat yang sangat menonjol dari keadaan tidak adanya kesatuan bahasa dalam mengisi kemerdekaan ini ialah adanya ketimpangan sosial yang semakin mendalam dan melebar antara gugusan kecil masyarakat kaya dan gugusan masyarakat yang terbesar yang miskin.<sup>2</sup> Kedua gugusan ini merupakan dua unit atau dua organisme yang sangat berbeda satu dengan yang lain. Dalam perjalanan sejarah kedua organisme ini dapat membelah tubuh bangsa dalam dua bagian, atau katakan adanya "dua bangsa" dalam satu tanah air. Dengan semangat sumpah pemuda yang telah bertekad untuk berbangsa satu, bangsa Indonesia, maka gejala ketimpangan sosial yang ada sekarang ini yang dapat menjadi embrio pembelah tubuh bangsa *haruslah* segera ditangani seawal mungkin sebelum terlambat.<sup>3</sup>

Salah satu cara untuk menanggulangi kemungkinan ini bagi negara kita ialah menyegarkan dan mengoperasionalkan kembali semangat yang *mengawali* sumpah pemuda tahun 1928 yaitu penggalangan perasaan senasib, sepele tanggung, rasa solidaritas nasional yang seharusnya tercermin dalam sistem pembangunan masyarakat Pancasila. Sehingga warga negara Indonesia yang paling lemah "dimampukan" untuk dapat memanfaatkan kesempatan dan kemudahan (fasilitas) yang ada. Khususnya untuk dapat memanfaatkan "delapan jalur pemerataan" yang dikemukakan oleh Presiden dalam pidatonya tanggal 16 Agustus 1978 di depan DPR-RI. Atau dengan kata lain "delapan jalur pemerataan" itu tidak terpisah dan terlepas satu sama lain, akan tetapi merupakan satu kesatuan kebijakan (policy) yang merupakan bagian

- 
- 1 Daoud Joesoef, "Orde Baru Belum Memiliki Strategi Pembangunan", *Derap*, No. 16, awal April 1978, hal. 35
  - 2 Sekedar ilustrasi, lihat Singarimbun, Masri dan Penny, D.H., *Penduduk dan Kemiskinan: Kasus Sriharjo di Pedesaan Jawa*, Bhratara, Jakarta, 1976
  - 3 Arnold Toynbee, *Surviving The Future*, London Oxford University Press New York Toronto, 1971, p. 10

dari sistem yang lebih luas, yaitu apa yang disebut di atas sebagai sistem pembangunan masyarakat Pancasila.

Salah satu dari delapan jalur ini lebih dikhususkan kepada pemuda yaitu "pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita". Jalur inipun hanya dan seharusnya hanya merupakan bagian integral dari keseluruhan seperti telah disebut di atas. Masalahnya tetap yang itu-itu juga, yaitu apakah pemimpin-pemimpin masyarakat kita mempunyai kesatuan bahasa dalam mengoperasionalisikannya.

Tampaklah bahwa pemuda sekarang ini dapat dianggap sebagai korban dari belum adanya kesatuan bahasa dalam mengisi kemerdekaan ini. Dan inilah *warisan mendasar* yang sulit terpikulkan oleh mereka nanti pada masa yang akan datang, dengan segala akibatnya yang barangkali di luar daya khayal dari semua manusia Indonesia yang hidup sekarang ini.

Walaupun begitu, bagaimanapun, hukum alam menyuruh kita untuk tetap bertumpu harapan pada manusia pemuda, karena pada akhirnya merekalah *satu-satunya warisan* yang bertanggung jawab dalam menghadapi masalahnya pada masa depan. Seperti yang dipesan oleh Sutan Sjahrir kepada Subadio Sastrosatomo di penjara Madiun (1963) bahwa "Penyelesaian revolusi Indonesia adalah di tangan kaum muda kita. Merekalah yang menentukan hari depan bangsa dan tanah air. Karena itu engkau jangan meremehkan mereka, bimbinglah mereka ke jalan yang benar ialah jalan pembaruan menuju masyarakat adil dan makmur, tanpa penghisapan dan penindasan".<sup>1</sup>

Mudah-mudahan realita pahit yang ada dalam masyarakat dapat semakin membuka mata, pikiran dan hati mereka sehingga terbenih nilai baru yang memungkinkan pemuda kita, tidak sekedar tenggelam dalam kemelut masalah masyarakatnya akan tetapi dapat melepaskan diri dari padanya. Sehingga dapat dipenuhi apa yang menjadi harapan dan keyakinan orang pada umumnya bahwa "Golongan muda di mana saja dan pada jaman apapun tetap merupakan golongan yang peka terhadap hal-hal yang tidak adil, yang bertentangan dengan kemerdekaan dan yang menyinggung rasa harga diri manusia. Nilai-nilai kemanusiaan yang ada pada mereka merupakan sumber energi dan semangat yang dapat mengatasi rasa takut dan rasa cemas tentang hari depannya".<sup>2</sup>

Dalam hubungan ini kita haruslah belajar dari "cara belajar" para pemimpin pergerakan terutama pada periode pra-kemerdekaan. Yaitu bahwa mereka tetap tekun belajar sendiri atau bersama-sama mengikuti perkembangan ilmu

---

1 H. Rosihan Anwar, *op. cit.*, hal. 75

2 R. Soegarda Poerbakawatja, "Nilai-nilai Kemanusiaan adalah Suatu Sumber Energi dan Semangat dalam Perjuangan Hidup", *Bunga Rampai Sumpah Pemuda*, BP PN Balai Pustaka, 1978, hal. 25

pengetahuan sekaligus terus mendalami dan mempertajam pengertian terhadap realita masalah masyarakatnya secara keseluruhan, yang kemudian melahirkan sikap dan tindakan yang tepat dan tegas disertai keteguhan watak yang menginspirasi masyarakat umumnya. Ketiga unsur ini merupakan komponen daripada idealisme, nasionalisme dan patriotisme mereka yang antara lain berpuncak pada peristiwa bersejarah 28 Oktober 1928 itu. Sesudah 35 tahun merdeka bangsa Indonesia telah memiliki 363 Pendidikan Tinggi (40 daripadanya adalah negeri),<sup>1</sup> berarti secara rata-rata hitung satu daerah tingkat II di Indonesia ini mungkin mempunyai lebih dari satu Perguruan Tinggi, apalagi pada ibu kota Daerah Tingkat I (propinsi).

Masalahnya sejauh mana lembaga ilmiah ini membantu perkembangan ilmu di Indonesia berikut mutu ilmunya terutama dalam menelaah masalah bangsanya? Sehingga jangan terus diwariskan gejala yang tidak sehat bahwa untuk mengetahui masalah bangsa Indonesia pada pelbagai bidang, bahkan untuk mengetahui pemikiran para pemikir dan riwayat hidup malah autobiografi pemimpin Indonesia, kita harus mempelajari melalui penulis asing dan karenanya melalui "kaca mata asing" pula. Kapankah pemuda Indonesia dapat menelaah masalah bangsanya dengan kaca matanya sendiri? Mungkin ini tantangan terutama bagi 255.000 mahasiswa yang sekarang ini sedang "berkesempatan emas" belajar pada 363 Pendidikan Tinggi di seluruh tanah air untuk belajar keras demi menjawab masalah ini, yang tidak saja memalukan akan tetapi juga tidak membenihkan rasa harga diri dan percaya kepada diri sebagai bangsa pada pemuda kita pada masa yang akan datang. Bagaimana mungkin budaya suatu bangsa dapat berkembang tanpa bangsa itu menjiwai "sikap budaya Science"? Bangsa demikian itu "tidak hanya terhimpit dalam bidang penghidupan tetapi juga mudah kehilangan kepribadiannya".<sup>2</sup>

Demi memenuhi fungsinya maka lembaga pendidikan tinggi membutuhkan banyak hal, tidak hanya iklim untuk hidup, akan tetapi juga penentuan kurikulum yang tepat, mutu guru dan lain-lain kemudahan (fasilitas) yang memadai. Atau dalam lingkungan yang lebih luas "kita harus membuka ruang dan mengembangkan iklim yang subur bagi tumbuhnya berbagai pangkalan pemikiran, dan dalam proses saling membanding dan saling mengasah ketajaman persepsi, kejauhan jangkauan berpikir dan kelengkapan

---

1 Menteri P dan K, Sjarif Thajeb, *Beberapa Aspek Pendidikan Tinggi di Indonesia*, Direktorat Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen P dan K, 1977, hal. 4; lihat juga *Perkembangan Perguruan Tinggi Selama 20 Tahun Indonesia Merdeka*, disusun oleh Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan

2 Lihat *Perkembangan Science di Indonesia*, yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Pasti dan Alam Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hal. 27

informasi masing-masing, dapatlah didorong satu proses pemikiran yang kreatif yang dapat menolong masyarakat kita melangkah maju".<sup>1</sup>

Mungkin inilah jalan yang memberi harapan untuk mencari peranan kepeloporan. Sebetulnya jalan ini, jalan lebar dan luas akan tetapi sering kekerdilan (kesempitan pandangan) kita sendirilah yang membuat jalan ini menjadi teramat sempit bahkan seolah-olah tertutup sama sekali. Masalahnya maukah kita, pemuda sekarang ini, memperluas cakrawala hidup ini demi membenihkan suatu peranan untuk menjawab tantangan masa depan secara lebih bermakna, sehingga dengan demikian dapat menerobos kondisi makro dan kondisi mikro yang mungkin menghambat.

Salah satu cara daripadanya yang lebih konkrit ialah mengembangkan semangat wiraswasta pada kalangan pemuda, dengan demikian mereka tidak menyerah kalah terhadap keadaan, akan tetapi mampu menciptakan sesuatu yang dapat menolong diri sendiri dan lingkungan dan sekaligus secara makro membina "perjuangan mewiraswastakan bangsa", seperti yang akhir-akhir ini secara sadar, berencana dan penuh keyakinan dan bersemangat dilancarkan oleh perintisnya Suparman Sumahamijaya.<sup>2</sup>

Memang setiap periode mempunyai masalah, kebutuhan dan tuntutan peranan tertentu dari warganya, yang berbeda dari satu periode ke periode lainnya. Keberdikarian dan kepeloporan dari pemuda tahun 1928 sangat jelas dalam melakukan peranan dari jamannya. Maukah pemuda masa kini membaca peranan jamannya dan memeloporinya seperti antara lain yang sudah dirintis oleh Suparman Sumahamijaya tersebut di atas?

Tampak semakin terasa oleh kalangan pemuda bahwa sangat diperlukan penempatan kemauan membaja untuk memaksa membina diri sendiri dari dalam dan dari bawah secara terus-menerus. Kerja keras semacam ini merupakan satu-satunya jaminan untuk berharap akan masa depan yang lebih baik. Dan semuanya ini terletak dalam genggam tangan para pemuda. Dengan semangat semacam ini, dalam pidato pembelaannya di hadapan Pengadilan Den Haag tanggal 9 Maret 1928 pemuda Hatta mensiter ucapan pujangga

---

1 Mochtar Lubis, *Bangsa Indonesia (Masa Lampau - Masa Kini - Masa Depan)*, Yayasan Idayu-Jakarta, 1978, hal. 29; lihat juga Dick Hartoko, "Tanda-tanda Jaman", *Majalah Basis*, Oktober 1978, XXVIII, No. 1

2 Lihat Suparman Sumahamijaya, "Perjuangan Kewiraswastaan Bangsa", *Bunga Rampai Sum-pah Pemuda*; berikut tulisan dari penulis yang sama, antara lain: *Arti dan Peranan Kewiraswastaan bagi Ketahanan Bangsa* (1978); *Pembangunan Masyarakat Pancasila: melalui Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia dengan Sistem Pendidikan Sikap Mental Wiraswasta* (1978); dan *Waktu, Watak Wiraswasta*; di samping itu telah diterbitkan oleh Panitia Penyelenggara Lokakarya Sistem Pendidikan dan Pengembangan Kewiraswastaan di Indonesia tahun 1978 *Sistem Pendidikan dan Pengembangan Kewiraswastaan di Indonesia*

kenamaan Rene de Clercq yang mengatakan: "Hanya satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dari perbuatan dan perbuatan itu adalah usahaku."

Kata-kata pujangga ini dikatakan oleh Bung Hatta waktu itu sebagai pedoman dari Indonesia Muda. Dan mudah-mudahan pemuda masa kini mau merenungkannya kembali untuk dapat membarui semangat juangnya serta meneruskan dan mengisi kelanjutan semangat juang pemuda 1928. Insya Allah.



Untuk menunjang kegiatan studi mahasiswa, para peneliti maupun lembaga-lembaga universitas, instansi-instansi pemerintah dan umum, CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) menyediakan penerbitan berupa majalah dan buku-buku:

**ANALISA**

*terbitan berkala, menyajikan beberapa analisa peristiwa dan masalah internasional dan nasional, baik ideologi dan politik maupun ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan, yang ditulis oleh staf CSIS maupun dari luar CSIS. Termasuk dalam seri ini adalah MONOGRAF yang membahas satu analisa tertentu. Harga per eks Rp. 500,— langganan setahun (12 nomor) Rp. 6.000,— sudah termasuk ongkos kirim, untuk Mahasiswa Rp. 4.800,—*

**THE INDONESIAN QUARTERLY**

*Majalah triwulan, memuat karangan-karangan hasil pemikiran, penelitian, analisa dan penilaian yang bersangkutan paut dengan masalah-masalah aktual Indonesia di forum nasional maupun internasional. Harga per eks Rp. 800,—, langganan setahun (4 nomor) Rp. 3.200,—*

**BUKU—BUKU**

*hasil penulisan staf CSIS baik mengenai strategi, ekonomi, ideologi, politik, hubungan internasional, pembangunan, hankam, sosial budaya dan lain-lain.*

Penerbitan-penerbitan tersebut di atas dapat diperoleh di Toko-toko Buku, atau langsung pada:

**BIRO PUBLIKASI — CSIS**  
**CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES**  
 Jl. Kesehatan 3/13, Jakarta Pusat      Telepon 349489

Untuk menunjang kegiatan pengkajian CSIS juga menyediakan PER-  
 PUSTAKAAN dan CLIPPINGS yang terbuka untuk pencinta pengetahuan,  
 analis dan peneliti dengan koleksi yang eksklusif, penyediaan data yang lengkap  
 dan informasi yang cepat. Untuk keperluan tersebut hubungilah:

**PERPUSTAKAAN CSIS dan BIRO INFORMASI DAN DATA CSIS**  
 Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta Pusat, Telepon 356532-5

